

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Letak Geografis Kota Jambi

Letak geografis Kota Jambi berada di bagian tengah Provinsi Jambi dengan posisi strategis yang menjadi pintu gerbang utama jalur transportasi darat, sungai, maupun udara. Secara astronomis, Kota Jambi terletak antara 1°30'–1°41' Lintang Selatan dan 103°40'–104°30' Bujur Timur. Lokasi ini menjadikan Kota Jambi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan jasa bagi provinsi serta daerah sekitarnya.

Secara administratif, Kota Jambi berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara: Kabupaten Muaro Jambi
- b) Sebelah Selatan: Kabupaten Muaro Jambi
- c) Sebelah Timur: Kabupaten Muaro Jambi
- d) Sebelah Barat: Kabupaten Muaro Jambi

Dengan luas wilayah 205,38 km², Kota Jambi berbentuk seperti area metropolitan kecil yang terkurung oleh satu kabupaten saja (Muaro Jambi). Kondisi ini menjadikan Kota Jambi sebagai enklave administratif, di mana seluruh aktivitas pembangunan, transportasi, dan interaksi masyarakat Kota Jambi memiliki keterkaitan erat dengan Muaro Jambi.

Jika diperhatikan secara strategis, letak Kota Jambi sangat menguntungkan. Jalur Lintas Timur Sumatera melewati kota ini, menghubungkan daerah Sumatera bagian utara (Riau, Sumatera Utara) dengan bagian selatan (Palembang, Lampung). Selain itu, keberadaan Bandara Sultan Thaha di bagian timur kota menjadikan Jambi memiliki akses udara langsung ke berbagai kota besar seperti Jakarta, Batam, Medan, dan Palembang. Dari jalur perairan, Sungai Batanghari juga terhubung dengan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi, yang berfungsi sebagai pintu keluar masuk barang dan komoditas penting.

Dengan posisi geografis tersebut, Kota Jambi bukan hanya berperan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi, tetapi juga sebagai sentra ekonomi, perdagangan, jasa, dan pendidikan di wilayah Jambi. Letaknya yang dikelilingi satu kabupaten membuat kota ini tumbuh sebagai kawasan urban yang sangat tergantung

sekaligus menjadi pusat interaksi bagi daerah hinterland-nya, terutama Kabupaten Muaro Jambi dan Batanghari.

Tabel 4.1 Luas dan Jumlah Kelurahan di Kecamatan-Kecamatan di Kota Jambi

Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Kelurahan	Jumlah RT
1. Kota Baru	36,11	17,56	5	176
2. Jambi Selatan	11,41	5,55	5	150
3. Jelutung	7,92	3,85	7	233
4. Pasar Jambi	4,02	1,96	4	58
5. Telanaipura	22,51	10,95	6	132
6. Danau Teluk	15,70	7,64	5	44
7. Pelayangan	15,29	7,44	6	46
8. Jambi Timur	15,94	7,75	9	192
9. Alam Barajo	41,67	20,27	5	206
10. Paal Merah	27,13	13,20	5	236
11. Danau Sipin	7,88	3,83	5	151
Jumlah / Total	205,38	100,00	62	1 624

Sumber : jambikota.bps.go.id

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang luas wilayah dan jumlah kelurahan di kecamatan-kecamatan di Kota Jambi, terlihat adanya variasi yang cukup signifikan dalam hal distribusi luas wilayah, jumlah kelurahan, serta jumlah Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Alam Barajo tercatat sebagai kecamatan dengan wilayah terluas, yakni 41,67 Ha atau 20,27% dari total luas Kota Jambi. Disusul Kecamatan Kota Baru dengan luas 36,11 Ha (17,56%) dan Kecamatan Paal Merah 27,13 Ha (13,20%). Ketiga kecamatan ini menguasai lebih dari setengah total luas wilayah Kota Jambi, sehingga dapat dikatakan pusat perkembangan kota secara fisik banyak bertumpu pada kawasan ini.

Dari sisi jumlah kelurahan, kecamatan dengan kelurahan terbanyak adalah Jambi Timur (9 kelurahan) dan Jelutung (7 kelurahan), sedangkan kecamatan lainnya rata-rata memiliki 4–6 kelurahan. Jumlah kelurahan yang besar mencerminkan kepadatan penduduk dan kebutuhan layanan administrasi yang lebih

banyak. Hal ini sejalan dengan jumlah RT, di mana Paal Merah (236 RT), Jelutung (233 RT), dan Alam Barajo (206 RT) memiliki jumlah RT terbesar, menandakan tingginya tingkat kepadatan dan aktivitas sosial masyarakat di wilayah tersebut.

Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah relatif kecil seperti Pasar Jambi (4,02 Ha atau 1,96%) dan Jelutung (7,92 Ha atau 3,85%) justru memiliki jumlah kelurahan dan RT yang cukup banyak, terutama Pasar Jambi dengan 4 kelurahan dan 58 RT serta Jelutung dengan 7 kelurahan dan 233 RT. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah kecil tersebut merupakan kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi, terutama karena menjadi pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Jika ditinjau dari jumlah total, Kota Jambi memiliki luas wilayah 205,38 Ha, terbagi dalam 62 kelurahan dengan 1.624 RT. Distribusi ini memperlihatkan bahwa pembagian wilayah administrasi tidak hanya didasarkan pada luas geografis, tetapi juga pada kepadatan penduduk dan kompleksitas kebutuhan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, wilayah dengan luas kecil namun jumlah RT tinggi cenderung membutuhkan perhatian lebih dalam hal pelayanan publik, infrastruktur, dan penataan ruang, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan antar kecamatan di Kota Jambi.

1.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan suatu wilayah atau negara. Dalam konteks ini, pertumbuhan ekonomi diukur melalui persentase perubahan produk domestik regional bruto (PDRB) dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi, termasuk peningkatan produksi barang dan jasa, pendapatan masyarakat, dan lapangan pekerjaan. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi Tahun 2011-2024

Tahun	PDRB (Rp. Milyar)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2011	11.932,76	7,79
2012	12.848,14	7,67
2013	13.939,74	8,50
2014	15.080,29	8,18
2015	15.851,95	5,12
2016	16.936,44	6,84
2017	17.728,34	4,68
2018	18.667,87	5,30
2019	19.550,81	4,73
2020	18.721,13	-4,24
2021	19.494,09	4,13
2022	20.540,75	5,38
2023	21.810,34	6,61
2024	21.910,35	4,98
Rata-Rata		5,40

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, perkembangan ekonomi Kota Jambi pada periode 2011–2024 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,4 persen. Angka ini mencerminkan bahwa secara umum Kota Jambi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di tingkat moderat, meskipun terdapat dinamika dan tekanan dari berbagai faktor eksternal maupun internal. Nilai PDRB secara konsisten meningkat dari Rp11.932,76 miliar pada tahun 2011 hingga mencapai Rp21.910,35 miliar pada tahun 2024, yang menandakan adanya perkembangan ekonomi yang berkesinambungan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak selalu berjalan stabil, melainkan mengalami pasang surut sesuai kondisi perekonomian nasional dan global.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan 8,50 persen, diikuti oleh tahun 2014 sebesar 8,18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada awal periode, Kota Jambi mengalami momentum pertumbuhan yang cukup pesat. Kinerja tersebut didukung oleh meningkatnya investasi, konsumsi masyarakat, serta peran sektor-sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa. Pertumbuhan

tinggi ini sekaligus memberikan gambaran bahwa pada masa tersebut perekonomian Kota Jambi berada pada fase ekspansi yang relatif baik.

Namun, setelah tahun 2015, terjadi perlambatan ekonomi yang cukup signifikan, dimana pertumbuhan turun menjadi 5,12 persen dan terus berfluktuasi di kisaran 4–6 persen hingga 2019. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Jambi mulai menghadapi tantangan, baik berupa keterbatasan pada sektor produktif maupun pengaruh perlambatan ekonomi nasional. Meskipun demikian, nilai PDRB tetap meningkat, yang berarti ada pertumbuhan ekonomi secara nominal, tetapi kecepatannya tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2020 menjadi periode paling berat, ketika pertumbuhan ekonomi Kota Jambi mengalami kontraksi sebesar -4,24 persen. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi, perdagangan, investasi, serta menekan daya beli masyarakat. Penurunan ini tidak hanya terjadi di Kota Jambi, tetapi juga hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun demikian, pada tahun-tahun berikutnya terlihat adanya pemulihan, dengan pertumbuhan kembali positif sebesar 4,13 persen pada tahun 2021, kemudian meningkat hingga 6,61 persen pada tahun 2023.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi kembali melambat menjadi 4,98 persen meskipun nilai PDRB terus naik. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian masih menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas pertumbuhan pasca pandemi. Secara keseluruhan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,4 persen, Kota Jambi dapat dikatakan memiliki fondasi ekonomi yang cukup kuat, meskipun perlu upaya lebih lanjut dalam penguatan sektor unggulan, diversifikasi ekonomi, dan peningkatan investasi untuk menjaga pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan di masa depan.

1.3 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang berasal dari kekayaan dan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. PAD digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah tanpa harus bergantung

pada bantuan dari pemerintah pusat atau transfer dana dari daerah lain. Untuk mengetahui perkembangan PAD di Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Perkembangan PAD di Kota Jambi Tahun 2011-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp. Juta)	Perkembangan (%)
2011	99.002	-
2012	113.086	14,23
2013	149.038	31,79
2014	246.432	65,35
2015	263.394	6,88
2016	287.528	9,16
2017	397.331	38,19
2018	338.887	-14,71
2019	393.435	16,10
2020	355.673	-9,60
2021	384.726	8,17
2022	436.884	13,56
2023	448.465	2,65
2024	457.213	1,95
Rata-Rata		14,13

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.3, perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi pada periode 2011–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 14,13 persen per tahun. Secara nominal, PAD terus meningkat dari Rp99.002 juta pada tahun 2011 menjadi Rp457.213 juta pada tahun 2024, yang berarti terjadi peningkatan hampir lima kali lipat selama periode tersebut. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 65,35 persen, yang menandai adanya lonjakan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh adanya kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, serta adanya penyesuaian tarif pajak maupun retribusi. Selain itu, tahun 2017 juga mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 38,19

persen, yang menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi penerimaan PAD secara lebih efektif.

Namun demikian, PAD Kota Jambi juga mengalami penurunan pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2015, laju pertumbuhan PAD Kota Jambi menurun cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 65,35%. Pertumbuhan PAD hanya tercatat sebesar 6,88%, dari Rp246,432 juta menjadi Rp263,394 juta. Penurunan ini menunjukkan adanya perlambatan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh keterbatasan dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah, serta kondisi ekonomi nasional yang pada saat itu sedang mengalami pelemahan akibat krisis global dan fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, meskipun PAD masih tumbuh, laju perkembangannya jauh lebih rendah dibandingkan tren sebelumnya.

Pada tahun 2018, PAD Kota Jambi mengalami kontraksi cukup besar dengan pertumbuhan negatif sebesar 14,71%. Realisasi PAD turun dari Rp397,331 juta menjadi Rp338,887 juta. Penurunan signifikan ini bisa mencerminkan adanya masalah dalam efektivitas pemungutan pajak daerah, pengelolaan retribusi, maupun penurunan kinerja sektor ekonomi yang menjadi basis penerimaan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam pola pertumbuhan PAD, sebab sebelumnya (2017) pertumbuhan PAD justru melonjak tinggi mencapai 38,19%.

Pada 2020, PAD Kota Jambi kembali mengalami penurunan sebesar 9,60%, dari Rp393,435 juta menjadi Rp355,673 juta. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah pandemi Covid-19, di mana aktivitas perekonomian masyarakat menurun drastis akibat pembatasan sosial dan lesunya sektor usaha. Penerimaan dari pajak hotel, restoran, hiburan, maupun retribusi daerah menurun signifikan karena banyak sektor yang berhenti beroperasi. Kondisi ini menggambarkan rentannya PAD terhadap faktor eksternal, terutama ketika perekonomian terganggu.

Meskipun masih menunjukkan pertumbuhan positif, pada tahun 2023 perkembangan PAD hanya sebesar 2,65%, dari Rp436,884 juta menjadi Rp448,465 juta. Angka ini relatif rendah dan mencerminkan perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2022 yang masih mencatat 13,56%. Faktor penyebab bisa berasal dari keterbatasan inovasi dalam intensifikasi dan ekstensifikasi pajak

daerah, serta kondisi ekonomi pascapandemi yang belum sepenuhnya pulih. Dengan capaian ini, dapat dikatakan bahwa upaya peningkatan PAD belum maksimal dalam mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan.

Pada tahun 2024, PAD Kota Jambi hanya tumbuh 1,95%, dari Rp448,465 juta menjadi Rp457,213 juta. Ini merupakan tingkat perkembangan terendah sepanjang periode 2011–2024. Stagnasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Rendahnya pertumbuhan PAD dapat disebabkan oleh keterbatasan basis penerimaan, kurangnya diversifikasi sumber pendapatan, atau menurunnya efektivitas pemungutan. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi baru dalam memperluas basis pajak, memperbaiki tata kelola, dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal agar pertumbuhan PAD kembali stabil.

Memasuki periode pemulihan, PAD Kota Jambi kembali mengalami peningkatan, dengan pertumbuhan 8,17 persen pada 2021, 13,56 persen pada 2022, dan melambat menjadi 2,65 persen pada 2023 serta 1,95 persen pada 2024. Meskipun terjadi perlambatan di akhir periode, tren positif ini menunjukkan adanya upaya konsisten pemerintah dalam menjaga penerimaan daerah. Namun, perlambatan tersebut juga mengindikasikan perlunya strategi baru dalam menggali potensi PAD agar tidak hanya bergantung pada sektor-sektor tertentu.

Secara keseluruhan, perkembangan PAD Kota Jambi menunjukkan dinamika yang cukup kompleks, dengan capaian rata-rata pertumbuhan 14,13 persen per tahun. Angka ini memperlihatkan bahwa kemampuan fiskal daerah relatif baik, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi pertumbuhan. Oleh karena itu, diversifikasi sumber PAD, peningkatan kepatuhan pajak, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pemungutan menjadi langkah strategis yang perlu diperkuat agar PAD dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.4 Perkembangan Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah pengeluaran anggaran pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta dapat diidentifikasi secara langsung hasil/output-nya. Belanja ini terjadi karena adanya

kegiatan tertentu, sehingga tidak dilakukan secara rutin seperti belanja pegawai tetap. Untuk mengetahui perkembangan belanja langsung di Kota Jambi selama tahun 2011-2024 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Perkembangan Belanja Langsung di Kota Jambi Tahun 2011-2024

Tahun	Belanja Langsung (Rp. Juta)	Perkembangan (%)
2011	224.139	-
2012	434.216	93,73
2013	469.703	8,17
2014	567.726	20,87
2015	723.033	27,36
2016	774.788	7,16
2017	887.230	14,51
2018	963.753	8,62
2019	925.487	-3,97
2020	1.039.323	12,30
2021	1.057.428	1,74
2022	965.209	-8,72
2023	1.037.151	7,45
2024	1.822.084	75,68
Rata-Rata		20,38

Sumber : Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4.4, belanja langsung Kota Jambi selama periode 2011–2024 mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20,38 persen per tahun. Secara nominal, belanja langsung meningkat cukup signifikan dari Rp224.139 juta pada tahun 2011 menjadi Rp1.822.084 juta pada tahun 2024, atau naik lebih dari delapan kali lipat. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan lonjakan sebesar 93,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini kemungkinan besar dipicu oleh adanya peningkatan alokasi anggaran pembangunan yang bersifat strategis atau proyek berskala besar. Selain itu, tahun 2024 juga mencatat

pertumbuhan tinggi sebesar 75,68 persen, yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam belanja langsung pada akhir periode.

Pada tahun 2013, perkembangan Belanja Langsung Kota Jambi hanya mencapai 8,17%, jauh menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencatat lonjakan hampir dua kali lipat (93,73%). Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai menahan laju belanja langsung, kemungkinan karena penyesuaian anggaran atau prioritas belanja yang lebih ketat. Kondisi ini juga bisa mencerminkan adanya keterbatasan fiskal serta kehati-hatian pemerintah dalam mengelola pengeluaran setelah peningkatan yang sangat besar di tahun 2012.

Pada tahun 2016, pertumbuhan belanja langsung kembali melambat menjadi 7,16%, turun cukup signifikan dari tahun 2015 yang masih mencatat 27,36%. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun nominal belanja meningkat, laju pertumbuhannya semakin terbatas. Faktor yang mungkin memengaruhi adalah penyesuaian struktur belanja, di mana pemerintah lebih fokus pada efisiensi dan pengendalian defisit.

Tahun 2018 mencatat perkembangan belanja langsung sebesar 8,62%, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tumbuh 14,51%. Penurunan ini menandakan adanya perlambatan pengeluaran langsung pemerintah daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya pengendalian fiskal untuk menjaga stabilitas anggaran atau karena adanya keterbatasan realisasi program prioritas. Meskipun masih positif, angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja tidak sekuat tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019, belanja langsung Kota Jambi justru mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif sebesar -3,97%, dari Rp963,753 juta menjadi Rp925,487 juta. Kontraksi ini bisa dipengaruhi oleh efisiensi belanja daerah, penundaan atau pengurangan proyek fisik, serta kebijakan pengetatan anggaran. Penurunan belanja langsung ini cukup signifikan karena sebelumnya tren belanja selalu meningkat, sehingga menandakan adanya kebijakan pengendalian fiskal yang ketat pada tahun tersebut.

Pada 2021, pertumbuhan belanja langsung hanya mencapai 1,74%, turun jauh dibandingkan tahun 2020 yang tumbuh 12,30%. Angka ini sangat rendah dan

hampir stagnan, kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi pascapandemi Covid-19, di mana pemerintah daerah lebih fokus pada belanja prioritas seperti kesehatan dan pemulihan ekonomi, sehingga belanja langsung untuk program lain menjadi terbatas. Rendahnya pertumbuhan ini menggambarkan keterbatasan ruang fiskal daerah pada masa pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2022, belanja langsung mengalami penurunan tajam dengan pertumbuhan negatif -8,72%, turun dari Rp1.057.428 juta menjadi Rp965.209 juta. Penurunan ini menunjukkan adanya restrukturisasi besar dalam alokasi anggaran, kemungkinan karena pemerintah mengalihkan sebagian belanja langsung ke belanja tidak langsung atau menekan pengeluaran untuk menjaga keseimbangan fiskal. Kondisi ini juga bisa terkait dengan kebijakan penghematan setelah masa pandemi, ketika daerah harus menyesuaikan prioritas pembangunan dengan keterbatasan penerimaan.

Secara keseluruhan, perkembangan belanja langsung Kota Jambi memperlihatkan tren yang positif meskipun dengan fluktuasi yang cukup tajam. Rata-rata pertumbuhan 20,38 persen per tahun mencerminkan tingginya prioritas pemerintah terhadap pembangunan langsung yang berdampak pada masyarakat. Namun, untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih stabil dan efisien, sehingga belanja langsung tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.